**BAB II**

**HUBUNGAN INDONESIA – AUSTRALIA DAN DUKUNGAN POLITIK AUSTRALIA TERHADAP GERAKAN PAPUA MERDEKA**

1. **Sejarah Singkat Hubungan Bilateral Australia – Indonesia.**

Hubungan negara bertetangga Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal ini dipicu oleh berbagai masalah seperti masalah Timor Timur pada 1999, peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia yang membuat hubungan bilateral Indonesia-Australia terganggu.

Hubungan antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang unik, dikatakan demikian karena dalam menjalin kehidupan bertetangga terdapat dua sisi yang berbeda di antara keduanya dalam satu sisi kerjasama yang kuat dapat mempererat hubungan di antara kedua negara tersebut. Di sisi lain terdapat berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan kerenggangan di antara kedua negara tersebut. Hal ini dapat terjadi di karenakan perbedaan ideologi politik, budaya, dan ras, serta tingkat pembangunan dan teknologi yang sedang berkembang. Pasang surut hubungan kedua negara inilah yang menjadi alasan tersendiri mengapa hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga ini di katakan sebagai hubungan yang unik. Melihat latar belakang masalah tersebut, disini penulis akan membahas bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Australia selama masa Perdana Menteri Kevin Rudd sejak 2007 hingga peralihan kekuasaannya dan persaingannya dengan Julia Gillard yang saling merebutkan kekuasaan meskipun dari partai yang sama yaitu Partai Buruh[[1]](#footnote-1).

1. **Jaman Orde Lama.**

Hubungan Indonesia dengan Autralia pada masa pra kemerdekaan dapat dikatakan sangat baik, karena Autralia mendukung penuh Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari tangan Belanda. Hal ini dapat ditunjukkan ketika Australia minta bantuan dewan keamanan PBB, agar agresi militer Belanda ke Indonesia dihentikan, supaya Australia merasa berjasa pada Indonesia. Australia merasa dirinya menjadi sangat berjasa pada kemerdekaan Indonesia. Selain itu, aksi militer Belanda (AMB) I pada bulan Juli 1947 Australia adalah negara Barat yang paling bersimpati kepada Indonesia atas tuntutan status merdeka secara internasional. Dengan diselenggarakannya KTN (Komis Tiga Negara) yang berubah menjadi UNCI, berakhir dengan KMB dan Belanda pun mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, masalah yang timbul yakni masalah perebutan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda.

Pada masa ini hubungan Indonesia dengan Australia mulai memburuk. Hal ini terjadi ketika Indonesia tetap kukuh mempertahankan Irian Barat. Namun, dalam hal ini Australia tidak setuju apabila Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia, pihak Australia lebih setuju apabila Irian Barat jatuh ke tangan Belanda. Selain itu di masa Orde Lama, Australia turut andil dalam menggagalkan upaya Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia di Kalimantan Utara meliputi Brunei, Sabah, Sarawak pada 1961-1965. Pengepungan besar-besaran pasukan militer TNI selama 68 hari pangkalan Angkatan Laut Malaysia di kawasan Semporna pada 1 Juli 1965 digagalkan oleh pasukan militer Australia yang bahu-membahu dengan pasukan Inggris, India dan Malaysia. Tak kurang sekitar 2.000 tentara dan milisi Indonesia tewas dalam pertempuran di Kalimantan Utara. Tercatat juga 200 serdadu Inggris dan Australia tewas selama pertempuran.

Australia beranggapan perubahan terjadi ketika Spender dari partai liberal (Belanda) menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, terhadap Irian Barat ia beranggapan bahwa[[2]](#footnote-2) :

1. Irian Barat merupakan pertahanan terakhir Australia dari segala kemungkinan adanya serangan dari arah utara.
2. Masa depan Irian Barat sangat penting bagi Australia karena Irian barat sangat strategis bagi Australia
3. Karena itu di depan sidang Majelis Umum PBB tahun 1950, ia berharap dengan pihak Indonesia jika sampai terjadi perundingan dan Belanda melepaskan Irian Barat ke Indonesia maka Australia akan kehilangan Irian Barat.
4. Irian Barat tidak layak untuk Indonesia karena Australia anti komunis, sedangkan pada waktu itu partai komunis Indonesia memiliki sifat otensif. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia salah satunya karena masalah Irian barat.

Sengketa atau masalah Irian Barat berakhir dengan ditandatanganinya persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1963 oleh delegasi Belanda (Menteri Luar Negeri) dan delegasi Indonesia (Menteri Luar Negeri Subandrio) yang menyatakan Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia.

1. **Jaman Orde Baru.**

Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto mencoba membangun hubungan yang lebih harmonis dengan Australia. Berbagai kerjasama bilateral disepakati ketika itu, namun ketika Soeharto mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah NKRI, kembali menegang hubungan Indonesia-Australia.

Awalnya Australia mendukung langkah Indonesia mengintegrasikan Timor Timur, sebab Australia khawatir ideologi komunisme yang dianut Fretilin makin berkembang jika Indonesia tidak menduduki Timor Timur. Namun ketegangan terjadi ketika lima jurnalis asal Australia tewas pada 16 Oktober 1975 di Kota Balibo saat meliput Operasi Seroja[[3]](#footnote-3).

Ketika Timor Timur berhasil diintegrasikan ke dalam NKRI pada 1978, Australia sebagai tetangga terdekat dengan Indonesia memandang sebagai ancaman nyata. Australia menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat selama Operasi Seroja. Bahkan Australia juga menuduh Indonesia melakukan pelanggaran yang sama di Papua. Akibatnya Kopassus, pasukan khusus TNI AD mendapatkan embargo oleh Amerika Serikat. Kopassus diberi cap sebagai pasukan pembunuh tak berperikemanusiaan.

1. **Jaman Reformasi.**

Memasuki Era Reformasi, hubungan Indonesia dan Australia menegang ketika referendum kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada 1999. Presiden BJ Habibie mengaku mendapat tekanan dari Perdana Menteri Australia John Howard untuk secepatnya melepaskan Timor Timur melalui referendum. Pada 1998, Howard menulis surat kepada Habibie yang mendukung kemerdekaan Timor Leste[[4]](#footnote-4).

Pada saat referendum dilakukan yang berujung pada kemerdekaan, Australia menerjunkan pasukan perdamaian untuk mengamankan pelaksanaan referendum. Pengiriman pasukan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap kemampuan keamanan Indonesia. Hubungan Indonesia dan Australia kembali harmonis ketika Bom Bali meledak pada 2001. Karena kebanyakan korbannya adalah warga Australia, kemudian Indonesia bekerjasama dengan Australia melakukan operasi pemberantasan teroris hingga saat ini[[5]](#footnote-5).

1. **Jaman Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.**

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menangguhkan kerjasama dengan Australia dalam isu sensitif terkait penyelundupan manusia, sambil mencela prilaku perang dingin Canberra. Bahwa kerjasama dengan Australia dalam sejumlah isu untuk sementara akan dihentikan, termasuk latihan militer dan pertukaran data intelijen[[6]](#footnote-6).

Tapi yang paling penting bagi Australia adalah [kerjasama](http://www.dw.de/pencari-suaka-kerikil-hubungan-ri-australia/a-17124275%22%20%5Ct%20%22_blank) kunci dalam bidang penyelundupan manusia, karena Canberra berusaha membendung aliran ribuan pencari suaka yang tiba dengan perahu dari Indonesia.

Ini adalah ledakan kemarahan terbaru dari Indonesia atas laporan, yang didasarkan pada [dokumen](http://www.dw.de/australia-sadap-presiden-ibu-negara-dan-para-menteri/a-17233742%22%20%5Ct%20%22_blank) yang dibocorkan oleh bekas mata-mata yang kini menjadi buronan Amerika yakni Edward Snowden, bahwa mata-mata Australia pernah mencoba menyadap telepon genggam presiden Yudhoyono, istri dan para menteri.

Presiden Indonesia secara terbuka mengecam Perdana Menteri Australia Tony Abbott lewat Twitter atas apa yang ia sebut sebagai sama sekali tidak menunjukkan nada penyesalan atas tuduhan upaya penyadapan oleh pemerintahan Australia sebelumnya. Laporan itu pertama kali dilontarkan oleh media-media Australia sendiri[[7]](#footnote-7).

Para pencari suaka adalah isu panas di Australia, dan menghentikan masuknya ribuan calon pengungsi yang naik kapal dari Indonesia adalah prioritas pemerintahan Abott yang baru terbentuk. Abott menang pemilu berkat kampanyenya mengenai kebijakan keras membendung para pencari suaka, termasuk memerintahkan kembali kapal-kapal yang membawa pencari suaka itu balik lagi ke Indonesia.

Keputusan Yudhoyono untuk menangguhkan kerjasama di beberapa bidang terjadi setelah Abott kembali **[menolak](http://www.dw.de/indonesia-ultimatum-australia/a-17239112%22%20%5Ct%20%22_blank)** meminta maaf atas skandal itu. Abott kelihatannya ingin berkelit, dengan mengacu kepada pengakuan bekas kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia dang mengatakan bahwa operasi mata-mata serupa juga dilakukan Indonesia di masa silam.

Indonesia telah mendengarkan percakapan telepon dari para politisi Australia, dan juga menyadap komunikasi militer dan sipil Australia dan bahkan menyadap kedutaan Australia di Jakarta selama krisis di Timor Leste tahun 1999. Pada masa itu, tidak ada tuntutan permintaan maaf yang diajukan Perdana Menteri Australia John Howard pada masa itu[[8]](#footnote-8).

Bocoran dokumen dari ABC dan surat kabar The Guardian, menunjukkan bahwa dinas intelijen elektronik Australia mencoba melacak aktivitas telepon genggam milik presiden Yudhoyono, istri dan para menteri selama 15 hari pada Agustus 2009, ketika PM Kevin Rudd dari Partai Buruh berkuasa.

1. **Jaman Pemerintahan Joko Widodo.**

Ketegasan Jokowi dalam menyetujui hukuman mati tersangka narkoba sudah tak diragukan lagi, Australia memang paling getol dalam membela warga negaranya, duo Bali Nine walau sudah jelas tertangkap membawa narkoba di Indonesia, Australia terus berusaha agar warga negaranya diberi remisi atau dibebaskan. Berbagai cara sudah dilakukan, misalnya[[9]](#footnote-9) :

1. Warga Australia ramai-ramai boikot Bali dengan tagar.
2. Australia juga mengancam akan memutus hubungan bilateral ekonomi dengan Indonesia demi membela warga negaranya yang terbukti sebagai pengedar narkoba di Indonesia.
3. Australia mengancam menarik duta besarnya dari Indonesia.
4. Australia mengancam akan membongkar kecurangan Jokowi dalam Pilpres 2014 jika melaksanakan hukuman mati, karena Australia sudah menyadap teleponnya Jokowi.

Sekali lagi ketegasan dan keteguhan Jokowi dalam mempertahankan hukuman mati di Indonesia tak goyah oleh segala ancaman Australia.

Hubungan Indonesia-Australia yang terbaru adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF). Hal itu dilakukan setelah adanya dugaan pelecehan terhadap TNI dan lambang negara Pancasila oleh militer Australia[[10]](#footnote-10).

Bukan hanya penghinaan lambang negara dengan plesetan Pancagila, oknum militer Australia diduga juga menyinggung persoalan Papua dan PKI. Disinggungnya urusan internal Indonesia ini terjadi di sekolah Angkatan Darat Australia di Perth. Insiden bermula ketika instruktur bahasa Indonesia yang berasal dari Kopassus merasa ada unsur materi pelajaran yang menghina Indonesia saat mengajar bahasa Indonesia di pangkalan militer di Perth[[11]](#footnote-11).

1. **Pasang Surut Kebijakan Australia atas Papua.**

Negara Pesemakmuran Australia (*Commonwealth of Australia*) atau yang sering kita sebut dengan nama Australia adalah sebuah negara yang terdapat dibelahan bumi bagian selatan yang juga menjadi nama dari benua terkecil didunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau disekitarnya. Disebelah barat Australia berbatasan dengan Indonesia dan Papua New Guinea, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Solomon, Fiji dan Selandia Baru. Meskipun Australia terletak didekat Asia, namun negara ini sering disebut sebagai bagian dari Dunia Barat karena kehidupan dari Australia yang mirip dengan Eropa Barat dan Amerika Serika.

Pada dasarnya politik luar negeri, atau kadang disebut pula sebagai kebijakan luar negeri, sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Tujuan-tujuan yang dimaksud ialah tujuan politik, keamanan dan ekonomi.

Kepentingan nasional itu ditentukan oleh para penentu kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses politik. Kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk Australia, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal negara tersebut. Secara umum, faktor-faktor internal tersebut antara lain ialah faktor historis, geografis, demografis, sistem politik, struktur politik, cara pandang aktor-aktor (pemberi pengaruh, pembuat, dan penentu kebijakan) terhadap sistem internasional, serta kepentingan dan peran yang diinginkan oleh negara tersebut di dalam sistem internasional. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara antara lain ialah lingkungan regional dan internasional, termasuk dalam hal ini perkembangan konstelasi politik, ekonomi dan keamanan internasional, serta kebijakan negara atau sekelompok negara lain terhadap negara tersebut.

Kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut di antaranya[[12]](#footnote-12) :

*Pertama, Historical Culture* atau budaya historis dan demografis. Dalam hal ini, terdapat dua negara yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri Australia yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Sampai awal abad ke-21 ini meski terdapat upaya untuk menjadikan kebijakan luar negeri Australia lebih mandiri dari pengaruh Amerika Serikat, khususnya jika Partai Buruh berkuasa adalah suatu kenyataan bahwa dalam banyak kasus yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan keamanan, kebijakan luar negeri Australia sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Beberapa contohnya adalah kebijakan Australia terhadap Indonesia berkaitan dengan masalah Irian Barat pada 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an serta kebijakan Australia atas Timor-Timur 1975-1999.

*Kedua*, Faktor Geografis. Sebagai negara benua yang terletak diselatan khatulistiwa yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan Inggris (*Anglo Celtic*), masyarakat Australia merasa terisolir oleh lingkungan luarnya. Jika kita menganalisis dari segi historis, kultur, bahasa, tradisi dan sistem politik demokrasi masyarakat Australia lebih dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, namun secara geografis Australia berdekatan dengan Asia. Pada pertengahan 1980-an, kedekatan geografis dengan Asia dipandang bukan sebagai hikmah melainkan sebagai bencana. Ketakutan Australia pada Asia ini sudah muncul pada tahun 1850-an ketika Australia menemukan tambang-tambang emas dan perak dinegerinya yang akan mengundang pendatang dari Asia khususnya Cina.

*Ketiga*, Perubahan konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan regional dan internasional tidaklah bersifat statis melainkan sangat dinamis. Dinamika yang terjadi baik dilingkungan regional dan internasional sangat mempengaruhi implementasi politik luar negeri Australia salah satu contoh Perubahan kebijakan Pertahanan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara pada masa Presiden Richard Nixon (*Doktrin Nixon 1969*) juga mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Australia dari ketergantungannya yang begitu besar pada aliansinya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya menjadi suatu upaya untuk memperkuat *defence self-reliance*. Ini bukan berarti Australia tidak ingin lagi beraliansi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atau tak mau lagi membangun jaringan pertahanan dengan negara-negara tetangganya, melainkan adanya upaya agar semakin mandiri dibidang pertahanan.

*Keempat*, tujuan yang ingin diraih dari kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional. Tujuan politik dari kebijakan luar negeri Australia terdiri dari empat hal yaitu[[13]](#footnote-13) :

1. Australia yang lebih aman, baik dari segi fisik, ekonomi, budaya dan politik, termasuk ideologi dan nasional etosnya.
2. Suatu dunia yang lebih aman,
3. Suatu dunia yang lebih kaya,
4. Suatu dunia yang lebih baik.

Kebijakan luar negeri Australia *security objectives* yaitu bagaimana menjaga keamanan Australia baik secara individual (*Self - Reliance*) dalam kerangka aliansi militer dibawah payung Amerika Serikat seperti SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) dan ANZUS ( *Australia, New Zealand, and The United States*) serta dibawah payung Inggris FPDA (*Five Powers Defence Arrangement*) atau dalam kerangka kerjasama Regional yang membangun jaringan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN dan Pasifik Selatan[[14]](#footnote-14).

1. **Dukungan Australia Pada Gerakan Separatis Papua : OPM dan KNBP.**

Sejarah perjuangan Papua, sudah disebutkan dan tercatat bahwa Papua sejak jaman kolonial Belanda sudah merdeka dan tergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi OPM dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) selalu bertolak belakang dengan pemerintah Indonesia melalui berbagai upaya memutarbalikan fakta. Sehingga rakyat Papua khususnya saat ini terganggu dengan berbagai ulah mereka, seluruh hak dan ekonomi rakyat Papua dimanipulasi oleh berbagai manuver OPM dan KNPB dengan melanggar hukum, organisasi tersebut juga sering melakukan berbagai aksi seperti menculik, menyiksa, memperkosa dan membunuh, inilah yang membuat Papua masih terhambat, mereka hanya perkeruh keadaan di Papua.

Tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat Papua atas nasib yang mereka alami selama ini karena ulah segelintir oknum OPM dan KNPB tersebut dengan berbagai aksi kekerasan dan penindasan serta propaganda dan provokasinya. Untuk itu masyarakat Papua harus terus bersorak satu suara agar Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) segera dibubarkan oleh pemerintah karena keberadaannya dan perjuangannya melanggar konstitusi.

Berbagai manuver provokatif politik dan aksi- aksi anarkis yang selama ini dilakukan oleh kelompok organisasi seperti KNPB dan ULMWP menjadi musuh dalam selimut dari seluruh masyarakat Papua. Isu-isu tentang kabar miring yang tidak pernah benar dan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan selalu disebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang membuat masyarakat semakin risih dan geram dengan pemberitaan tersebut.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan salah satu organisasi di Wilayah Papua Barat yang saat ini sedang naik daun. Namun naik daunnya bukan karena hal yang baik melainkan karena sering berbuat onar dan memprovokasi masyarakat. KNPB sering melakukan aksi demo yang berujung bentrok dengan aparat keamanan dan melanggar ketertiban umum sehingga berdampak meresahkan masyarakat yang selanjutnya berbagai peristiwa tersebut diputar balikan faktanya untuk dipublikasikan dan dijual ke media internasional guna mendapat perhatian dan simpati mayarakat internasional. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena negara ini bukan negara yang dihuni oleh provokator seperti para aktivis KNPB. Sehingga pantas jika KNPB itu dibubarkan agar tidak ada lagi organisasi yang membuat resah masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.

Organisasi-organisasi faksi politik di Papua, dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, mencoba menarik dukungan dari berbagai Negara di dunia, termasuk Negara-negara di kawasan Eropa, Asia Pasifik terutama sekali Australia[[15]](#footnote-15). Pergerakan di kawasan Asia Pasifik, seperti yang kita ketahui sendiri, walaupun dalam KTT PIF (*Pacific Island Forum*), Negara-negara pasifik di Melanesia mengakui kedaulatan Indonesia di Papua, tetapi masuknya pembicaraan tentang pelanggaran HAM di Papua di forum PIF yang merupakan forum ekonomi dan pembangunan serta bukan forum HAM merupakan upaya segelintir pihak yang coba menginternasionalkan isu Papua  dengan berbagai manuver pemutarbalikan fakta yang semuanya ini terdapat kepentingan terselubung didalamnya.

Bila membicarakan mengenai pergerakan aktivis OPM di Eropa maka kita harus membicarakan tentang kelompok Benny Wenda. Tidak banyak hal yang bisa dibanggakan oleh kelompok ini. Ketokohan Benny Wenda, yang dicalonkan menjadi peraih Nobel 2014 ini ternyata tidak bisa membantu mengangkat aktivitas kelompoknya. Sekitar Desember 2010, Benny Wenda menjalin kesepakatan dengan parlemen Skotlandia untuk saling mendukung. Kesepakatan saling dukung antara parlemen Skotlandia dengan Benny Wenda ini disebabkan tidak bergemingnya Parlemen Inggris terhadap usaha Benny Wenda untuk mendapatkan dukungan lepasnya Papua dari Indonesia lewat IPWP-nya (*International Parliamentarians for West Papua*). IPWP sendiri dibentuk pada 15 Oktober 2008 di Inggris dengan maksud meyakinkan anggota-anggota parlemen berbagai negara di dunia untuk mendukung pemisahan Papua dari Indonesia. Di Inggris sendiri, tempat Benny Wenda tinggal, usaha IPWP tidak bisa dikatakan berhasil. Mereka hanya bisa meyakinkan dua anggota parlemen Inggris *Lord Harries of Pentregarth* MP dan Hon. Andrew Smith MP dari 646 anggota *House of Commons* dan 746 anggota *House of Lords.*

Problem Papua ini tidak bisa dilihat dari covernya saja. Adanya isu teror, pelanggaran HAM, konflik antar suku, penembakan gelap, himbauan untuk memboikot Pemilu  atau pemboikotan segala program/agenda yang diselenggarakan pemerintah, disinyalir “permainan dan provokasi asing” serta bagian dari modus dan metode kolonialisme. Gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM merupakan suatu ironi dimana anak bangsa sendiri dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing sehingga mereka memperjuangkan agar Papua terlepas dari Indonesia. Mereka tidak menyadari bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak asing bukanlah hal yang gratis. Justru mereka ingin melakukan penjajahan kepada masyarakat Papua secara tidak langsung. Bahkan bentuk separatis OPM ini adalah bentuk taktik *devide et impera*. Persaudaraan bangsa Indonesia dipecah belah agar dapat dikuasai oleh pihak asing.

Agar Papua menjadi damai, maka masyarakat Papua harus bersama-sama menolak dan membubarkan organisasi-organisasi tersebut. Untuk itu kita semua sebagai warga Indonesia khususnya masyarakat Papua, jangan sampai terprovokasi oleh kelompok-kelompok tersebut, kita harus waspada. Kekerasan di Papua senantiasa dipelihara dan diciptakan oleh OPM dan KNPB serta pengikutnya, oleh karena itu kita berharap agar rakyat Papua kritis dan tegas melawan aksi-aksi anarkis yang kerap dilakukan oleh OPM. Mari kita semua yang merasa masyarakat Papua, harus selamatkan Papua ini dari orang-orang yang selalu mengusik ketenangan tanah Papua, kita semua harus bersatu membangun Papua, dan menjaga tanah Papua dari gangguan OPM, KNPB dan organisasi-organisasi yang lain, karena mereka selalu mencari cara agar Papua terlepas dari NKRI.

Jika semuanya berjalan dengan baik, dikawal dengan baik secara komprehensif oleh semua elemen terkait, berbagai persoalan Papua akan terselesaikan, yaitu pembangunan yang merata di Papua, perbaikan ekonomi masyarakat Papua, hilangnya gerakan pengacau keamanan di Papua dan pada akhirnya, terjaganya keutuhan NKRI.

Pemerintah Indonesia dengan upaya-upaya itu berharap bisa membukakan mata dunia bahwa pelaku separatisme di Papua hanyalah segelintir orang oportunis. Sementara mayoritas warga Papua bersemangat untuk membangun daerahnya dalam bingkai NKRI.

1. **Propaganda Politik dan Intervensi Australia atas Papua.**

Gencarnya propaganda Papua merdeka di Australia yang dilakukan para petualangan politik dari dalam dan luar negeri, telah melahirkan dualisme antara Senator Richard Di Natale dari Partai Hijau dengan Menlu Australia Bob Carr, lantaran adanya perbedaan sikap politik terkait masalah separatisme di wilayah Papua[[16]](#footnote-16).

Menyikapi momentum tersebut, Menlu Indonesia dan Menhan berkunjng ke Australia dan bertemu mitranya Menlu Bob Carr. Tujuan pertemuan itu tentu saja untuk menjaga hubungan harmonis kedua negara sahabat yang bertetangga dekat itu. Patut diduga, forum itu juga digunakan oleh Menlu RI untuk menggugat rasa hormat Australia terhadap kedaulatan wilayah NKRI, khususnya kedaulatan Indonesia atas Papua[[17]](#footnote-17).

1. **Internasionalisasi Masalah HAM di Papua.**

Secara umum, perkembangan politik dan keamanan Papua dapat dipahami dari tiga isu utama: *pertama*, internasionalisasi Papua yang dimotori Australia. *Kedua*, penyelesaian masalah-masalah HAM. *Ketiga*, perkembangan dan implementasi Otonomi Khusus (Otsus Papua). Internasionalisasi isu Papua ditandai dengan gerakan politik kaum muda Papua yang semakin solid dalam membangun koordinasi dan sinergi dengan jaringan aktivis HAM di dalam maupun di luar negeri dengan basis perjuangan mereka di Australia. Koordinasi gerakan lokal Papua menghasilkan wadah perjuangan politik yang dinamakan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang mendapat status sebagai peninjau (*observer*) di dalam MSG[[18]](#footnote-18).

Koordinasi gerakan politik ULMWP dilakukan pula dengan diaspora Papua di luar negeri terutama sekali Australia dengan mengusung agenda kampanye mengenai pelanggaran HAM di Papua. Kampanye politik ini mendapat respon luas dari komunitas di negara-negara yang menjadi basis OPM di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Pasifik Selatan. Dukungan atas perbaikan nasib orang Papua sebagai bangsa Melanesia bahkan terus meluas, termasuk dari Benua Afrika[[19]](#footnote-19).

Seiring dengan kampanye isu-isu HAM oleh ULMWP di luar negeri, maka penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua menjadi hal yang sangat mendesak. Terdapat dua hal utama yang perlu segera ditangani untuk memperbaiki kondisi HAM Papua: *pertama*, penyelesaian isu HAM secara menyeluruh bukan hanya mengenai hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Isu HAM ini terkait dengan persoalan investasi di Papua yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan juga berada di wilayah tanah adat. *Kedua*, penyelesaian tiga kasus kekerasaan yakni Wamena, Wasior, Paniai harus segera dilakukan untuk membuktikan kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keamanan Papua. Dalam rangka penyelesaian masalah-masalah HAM masa lalu di Papua tetap perlu dipenuhi yang mencakup hak-hak korban, terutama perempuan dan anak, serta mengatasi trauma para korban konflik dalam program *trauma healing*.

Implementasi Otsus Papua di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami dinamika yang cukup membingungkan. Pada awal kepemimpinannya, Papua menjadi perhatian penuh Presiden Jokowi dalam berbagai aspek, termasuk mengenai pentingnya dialog bagi Papua. Namun memasuki akhir tahun kedua kepemimpinannya, penyelesaian masalah Papua menjadi *business as usual*, misalnya pembangunan infrastruktur di Papua cenderung mereduksi pentingnya menangani masalah politik dan keamanan di Papua maupun di luar negeri. Terkait dengan penyelesaian masalah HAM Papua, pembangunan sosial ekonomi dan investasi justru tidak memperhatikan persoalan hak-hak adat dan kerusakan lingkungan. Sementara pemekaran daerah masih menjadi proyek besar kementrian tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) Papua yang memadai. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak, langkah preventif untuk mengurangi potensi kekerasan politik di Papua sangat disarankan dapat segera disiapkan oleh berbagai pihak, khususnya oleh aparat keamanan[[20]](#footnote-20).

1. **Dukungan Australia Pada Enam Negara Pasifik.**

Upaya dialog dengan elemen Papua meningkat. Selain kelompok sipil, kelompok bersenjata pun sudah ada pembicaraan. Namun belum ada tindakan kapan dan waktunya tercipta suatu bentuk pembicaraan yang kemudian menjadi perhatian kita. Efek pembicaraan pemerintah dengan pihak pihak yang berseberangan sudah mulai ada. Pembebasan Tapol dan Napol, pengurangan OPM gadungan. Lalu, langkah selanjutnya adalah visi otsus dan MP3EI sebagai bahan mentah yang selalu menjadi jawaban pusat ketika ditanya soal Papua.

Pemerintah Indonesia di bawah payung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) wajib mengadakan pembicaraan terkait Papua dengan sahabatnya di pasifik. Status Indonesia di MSG sebagai pemantau. Karena bicara soal Papua Barat yang bagian dari NKRI, tugas negara adalah menjawab permasalahan ini pada negara-negara Melanesia. Penuhi etika diplomatik pula, undangan dari pemerintah RI pun telah di sanggupi para petinggi negara sahabat. Mereka sudah datang. Mereka sudah mendengar dan melihat langsung status Papua : pembangunan, ekonomi, kesejahteraan, sosial budaya selama orang Papua dibawah naungan pemerintah RI[[21]](#footnote-21).

Petinggi MSG cenderung berkilah dengan dalih Papua bagian dari NKRI. Namun, ketika menerima delegasi WPNCL, perdana mentri Salomon, Rt. Hon. Gordon D. Lilo menegaskan pada kunjungan delegasi WPNCL di kantornya bahwa kasus Papua Barat adalah masalah dekolonisasi yang belum lengkap, telah berlangsung terlalu lama, itu harus diselesaikan sekarang. Lilo telah berbicara dengan penuh keyakinan setelah pemerintahnya telah berhasil mensponsori pencantuman kembali Ma'ohi Nui/Polinesia Prancis masuk dalam daftar Dekolonisasi PBB Wilayah tidak pemerintahan sendiri (*Non self-governingTerritories*) pada bulan Maret tahun ini. Staf Khusus Presiden RI Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan Kep. Solomon memahami keseriuasan pemerintah RI memajukan penduduk di Papua dan Papua Barat. "Kesempatan mereka berkunjung membuka mata mereka bahwa Indonesia bersungguh-sungguh memajukan wilayah kita, bahkan di Papua sekalipun," katanya. Faiz menambahkan Kep. Solomon dan negara lain yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mengakui sepenuhnya keutuhan NKRI dari Sabang ke Merauke. MSG adalah organisasi internasional yang terdiri atas Fiji, Papua Nugini, Kep. Solomon dan Vanuatu. Diplomasi RI tak saja dilakukan secara politis. Di bidang ekonomi pun ada peningkatan. Setelah menandatangani kerjasama, RI-PNG menyepakati hal hal terkait perhubungan, Batas Negara dan Ekstradisi. Akan dibuka satu penerbangan langsung dari Jakarta ke Port Moresbi. Kemudian soal perbatasan Negara di tingkatkan pada ranah administrasi Negara. Terakhir adalah masalah ekstradisi para buronan koruptor dari Indonesia yang menetap di PNG. Bahkan, soal perbatasan ada langkah kedua negara untuk menertibkan pentolan Papua merdeka di wilayah PNG. Fiji dan Salomon, belum terkonek bentuk kerjasamanya. Untuk Vanuatu, Indonesia telah melakukan kerjasama di bidang ekspor sapi dan kerjasama pelatihan militer RI-Vanuatu. Kesepakatan ini telah di teken pada era Perdana Menteri Vanuatu sebelumnya. Bahkan Perdana Menteri Vanuatu yang baru justru menyatakan bahwa dia akan mengevaluasi kerjasama ini terkait status Papua di MSG. Terlepas dari kehadiran Papua pada MSG kemudian pemerintah RI gencar melakukan lobi-lobi kawasan, tetapi misi Papua sebagai bentuk menegaskan apa yang termaktub pada resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Siapapun yang ada dalam PBB, wajib menyelengarakan resolusi EKOSOC. Indonesia maupun negara anggota MSG ditagih komitmen mereka merealisasi resolusi yang belum di hapus itu. Papua di MSG Sudah Final Sekali lagi, ketegasan ini saya kemukakan karena ada beberapa pihak yang masih galau dengan status Papua ini. Bahwa keanggotaan Papua sudah diterima. Bahwa aplikasi penentuan nasib sendiri orang Papua yang perlu di perdalam oleh anggota MSG. Jadi, penentuan sikap apakah menerima penetuan nasib sendiri atau tidak, disini letak perkaranya. Sedangkan Papua sendiri, sudah diterima. Aspirasi pisah dari NKRI saja yang membuat anggota lainnya memilih untuk mempertimbangkan. Bila nantinya aplikasi penentuan nasib sendiri di tunda atau di tolak, maka selanjutnya, nasib Papua di arahkan sama dengan FLNKS di Kaledonia baru. Dimana, front sosialis kanak ini telah di berikan referendum oleh Perancis yang akan di gelar pada September 2014 mendatang.

Karena tekanan yang konsisten oleh Vanuatu dan banyak pemimpin lainnya termasuk organisasi masyarakat sipil di Pasifik khususnya di Melanesia akhirnya para pemimpin *Melanesia Spearhead Group* (MSG) membuat keputusan tentang Papua Barat selama KTT ke-19 yang diadakan di Noumea, Kanaky Kaledonia Baru. Dalam 'resolusinya yang diumumkan dalam sidang paripurna pada 21 Juni para pemimpin MSG membuat dua keputusan penting tentang Papua Barat.

*Pertama*, MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG. *Kedua*, MSG menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain dari kekejaman yang berkaitan dengan rakyat Papua Barat. Ini mendorong anggota untuk meningkatkan kekhawatiran ini melalui hubungan bilateral dengan Indonesia. Keterlibatan Papua di MSG sendiri merupakan lanjutan dari komunitas pasifik selatan. Presiden MSG yang baru, Victor Tutugoro dari FLNKS membuka dan juga berbicara pada sidang paripurna yang diadakan di Kantor Pusat bekas Komisi Pasifik Selatan (*Head Quarters of the former South Pacific Commission*) sekarang Komunitas Pasifik Selatan (*South Pacific Community* – SPC).

Keputusan MSG tentang aplikasi oleh WPNCL untuk keanggotaan tetap dipertahankan menunggu kunjungan ke Indonesia oleh Menteri Luar Negeri MSG untuk memenuhi undangan Jakarta. Secara politik itu adalah sebuah pengakuan oleh Indonesia bahwa masalah Papua Barat tidak lagi merupakan masalah internal bagi Indonesia karena beberapa ingin dunia percaya.

Hal ini jelas, Indonesia mencatat mandat PBB untuk anggota MSG atas keberhasilan mensponsori masalah dekolonisasi misalnya Vanuatu, Timor Timur, dan sekarang Kanaky Ma'ohi nui/Poynesia Perancis. Untuk *record* yang mengesankan itu, Indonesia ingin berada dalam hubungan baik dengan MSG karena sudah merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi WPNCL apakah kunjungan atau tidak ada kunjungan tulisan ini sudah terpampang di dinding. Indonesia harus mematuhi Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) dan Resolusi 1541 (XV)[[22]](#footnote-22).

1. Hubungan Indonesia-Australia, http://www.kompasiana.com/Hubunganindonesiaaustralia.html diakses tanggal 26 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Hubungan RI-Australia mulai membeku, <http://www.dw.com/id/hubungan-ri-australia-mulai-membeku/a-17241155>, diakses tanggal 17 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid*.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-8)
9. # [Ternyata Ketegasan Jokowi Membuat Australia Mati Kutu](http://suara-kami.blogspot.co.id/2015/05/ternyata-ketegasan-jokowi-membuat.html), sumber : <http://vivanews/2015/05/ternyata-ketegasan-jokowi-membuat.html>, diakses tanggal 27 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-9)
10. #  Bayu Septianto, Pancasila Dilecehkan, TNI Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia, sumber : <http://news.okezone.com/read/2017/01/04/337/1583005/pancasila-dilecehkan-tni-hentikan-kerja-sama-militer-dengan-australia>, diakses tanggal 27 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-10)
11. #  Ibnu Hariyanto, Tak Hanya Pancagila, Australia Juga Singgung soal Papua dan PKI, sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3388437/tak-hanya-pancagila-australia-juga-singgung-soal-papua-dan-pki>, diakses tanggal 27 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-11)
12. ###  Oscar Angga Pradhipta, Kebijakan Utama Politik Luar Negeri Australia, sumber : <http://oscaranggapradhipta.blogspot.co.id/2014/01/kebijakan-utama-politik-luar-negeri.html>, diakses tanggal 27 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Sumber : [www.katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../1673/1674.pdf](http://www.katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../1673/1674.pdf) diakses pada tanggal 27 Januari 2017. John Howard pada masa pemerintahannya mengumumkan suatu kebijakan baru tentang informasi wilayah maritim Australia yang dikenal dengan nama *Australia’s Maritime Identification Zone* (AMIZ) pada tahun 2004 (melalui pernyataannya “*Strengthening Australia’s Offshore Maritime Security*”). [↑](#footnote-ref-14)
15. #  Yusack Keroom, Menolak Aksi OPM dan Manuver KNPB Memisahkan Papua dari NKRI, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2013, hlm. 14-17.

 [↑](#footnote-ref-15)
16. Menlu Australia Kecam Senator Pendukung Separatis Papua. Sumber : Selengkapnya : <http://www.kompasiana.com/verona/menlu-australia-kecam-senator-pendukung-separatis-papua_550eabd6813311b82dbc62ba>, diakses tanggal 27 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. MSG pada pertemuan bulan Juni 2015. Keinginan ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG ditunda sampai September 2016. Sumber : **Adriana Elisabeth/ Peneliti, Puslit Politik LIPI.** [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. #  Sebagaimana masukan Tim Kajian Papua LIPI dalam diskusi dengan Komisi 1 DPR RI pada 2013, untuk membangun Papua sebagai tanah damai, maka perlu segera dilakukan tiga hal : penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan penataan aparat keamanan di Papua, sumber : [UPDATING PAPUA: Internasionalisasi Papua, Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM, dan Optimalisasi Otsus Papua](http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/1077-updating-papua-internasionalisasi-papua-penyelesaian-kasus-kasus-pelanggaran-ham-dan-optimalisasi-otsus-papua), <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/1077-updating-papua-internasionalisasi-papua-penyelesaian-kasus-kasus-pelanggaran-ham-dan-optimalisasi-otsus-papua>, diakses tanggal 27 Januari 2017.

 [↑](#footnote-ref-20)
21. Seperti biasanya, statemen politis pun mengudara usai kunjungan ini dilakukan. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Gordon Darcy Lilo menyatakan dukungan atas langkah Indonesia mengutamakan pembangunan ekonomi dalam upaya penyelesaian masalah Papua. "Saya sempat berkunjung ke Provinsi Papua. Saya cukup puas dengan kemajuan yang sedang berlangsung di provinsi di Papua," katanya. Pernyataan yang sama ketika perdana mentri Papua Nugini berkunjung ke Jakarta paska KTT MSG di gelar. <http://www.kompasiana.com/arki.papua/resolusi-pbb-pedoman-msg-atasi-masalah-papua-barat_552c7e926ea834a5448b45b9>, diakses tanggal 22 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)